

KETERLIBATAN WOODSIDE PETROLEUM ENERGY AUSTRALIA DALAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS DI CELAH TIMOR

Oleh : Stary Kendly

Pembimbing : Drs. Idjang Tjarsono, M. Si²

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional – Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Subrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study aims to determine the involvement of Australian oil companies in oil and gas management in the Timor Gap. Timor Leste has been listed as one of the world's independent nations on 20 May 2002. Australia became an active country in East Timor's independence during the reign of Prime Minister of Australia, Jhon Howard. Timor Leste is a country with natural resources, oil and gas in the Timor Gap that can improve and develop the economy in Timor Leste.

This study uses the theory of comparative advantage which sees that as an independent country, Timor Leste specializes in the production of the country's oil and gas fields in Timor-Leste that attract the attention of other countries to get involved and cooperation in oil and gas management in the Timor Gap. Level of analysis and level of analysis used in this study is double. At the level of analysis nation state and multinational companies. The method used is qualitative and data collection through library research.

This access to energy is an important driver of Australia to be involved in handling the turmoil in East Timor following the referendum. Australian companies are involved in oil and gas management in the Timor Gap. This can be seen from Australian oil companies operating in each of the oil and gas fields in the Timor Gap. Australia and Timor Leste recognize the importance of oil on the seabed for the future of Timor-Leste so that oil company contracts are maintained and exploration in the Timor Sea is continued to allow Timor-Leste to receive revenues from the oil and gas.

Keywords : Australia, Timor Gap, Timor Leste, Multinational Cooperation, Woodside Petroleum Energy, Oil and Gas

Pendahuluan

Penulisan ini berfokus untuk mengetahui keterlibatan *Woodside Petroleum Energy* Australia dalam pengelolaan migas di Celah Timor. Penelitian ini berlatar belakang studi ekonomi politik internasional. Ekonomi politik internasional merupakan bidang studi yang membahas interaksi,

keterkaitan, serta saling mempengaruhi antara faktor-faktor ekonomi dan politik dalam lingkup hubungan internasional sehingga ada dua variabel pokok dalam fenomena ekonomi politik internasional, yaitu bahwa hakekat aktivitas ekonomi

adalah pasar, dan hakekat aktivitas politik adalah negara.¹

Menurut sejarah, Timor Leste adalah bekas pecahan negara koloni dari Portugis. Portugis mulai menjajah di Timor Leste pada awal abad 16. Periode kolonialisme portugis di Timor Leste berakhir pada tahun 1975 yang kemudian Indonesia mengklaim Timor Leste sebagai salah satu provinsi dinegara Indonesia, provinsi 27, pada tahun 1976 dengan nama Timor Timur. Timor Leste atau Timor Timur (sebelum merdeka) yang bernama resmi Republik Demokratik Timor Leste (juga disebut Timor Lorosa'e) adalah sebuah negara di Asia Tenggara. Terletak disebelah Utara Australia dan dibagian Timur Pulau Timor. Selain itu wilayah negara ini juga meliputi Pulau Kambing atau Atauro, Jaco, dan enklave Oecussi-Ambeno di Timor Barat. Pada Tahun 1975, Timor Leste memproklamasikan kemerdekaannya, tetapi Indonesia menjadikan wilayah timor Leste ini sebagai provinsi ke 27 dengan nama Timor Timur. Setelah referendum yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999, di bawah perjanjian yang disponsori oleh PBB antara Indonesia dan Portugal, mayoritas penduduk Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia. Timor Timur menjadi negara berdaulat pertama pada abad ke 21 yaitu pada tanggal 20 Mei 2002.²

Akhir 1990-an, Australia mengeluarkan sikap untuk mendukung kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. Disisi yang lain era tahun 1990-an adalah era dimana telah terbukti bahwa di kawasan Timor Leste, tepatnya Laut Timor, mengandung

sumber daya alam berupa minyak dan gas yang melimpah. Lebih khusus lagi di bagian Celah Timor yang ketika secara pengelolaan didominasi oleh perusahaan-perusahaan minyak asal Australia, berkat kesepakatan Celah Timor antara Australia dan Indonesia yang menguasai Timor Leste. Namun di tahun-tahun 1990-an Australia merasa cemas tentang legalitas statusnya sebagai pemegang hak yang sah untuk melakukan eksploitasi minyak dan gas di Celah Timor karena pada saat itu status kesepakatan Celah Timor yang telah memberikan hak legal terhadap Australia untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas di Celah Timor banyak dipertanyakan tentang kelegalitasannya.

Dengan tekanan yang luar biasa dari dunia Internasional untuk kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia, dimana Australia merasa ikut bertanggung jawab atas invasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Timor Leste dimana ketika itu Australia merupakan satu-satunya negara barat yang mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Leste. Ditambah lagi Australia juga berkepentingan untuk mengamankan hak legalnya untuk mengeksplorasi minyak dan gas yang ada di Celah Timor, dimana kesepakatan Celah Timor yang dilakukannya dengan Indonesia yang memberikan kelegalan tersebut mulai dipertanyakan di dunia Internasional semenjak tuntutan Portugal di tahun 1991, meskipun Mahkamah Internasional tidak menanggapi secara positif tuntutan tersebut.

Australia memberikan dukungan terhadap Timor Leste untuk merdeka dari Indonesia dengan harapan setelah Timor Leste merdeka maka Australia bisa melakukan perjanjian ulang dengan Timor Leste mengenai pembagian hasil eksplorasi minyak di Celah Timor yang sebelumnya hak tersebut didapatkan

¹ Marbun, Bn. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

² Dhiyaulhaq, *RPULplus sd*, Jakarta : PT. Wahyu Media. 2015

dari perundingan dengan Indonesia yang sekarang dipertanyakan keabsahannya. Sementara itu bentuk dukungan yang dilakukan Australia terhadap kemerdekaan Timor Leste diantaranya adalah, pertama Menteri John Howard mengirim surat kepada presiden Habibie yang mengusulkan agar Indonesia memberi otonomi ke Timor Timur. Howard ingin menunjukkan kepada rakyat Timor Leste bahwa sebenarnya Australia mendukung keinginan rakyat Timor Leste untuk mendapatkan kemerdekaan dari Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendapat simpatik dari Timor Leste untuk melancarkan kepentingannya atas minyak dan gas di Celah Timor.

Celah Timor adalah daerah yang landas kontinen antara Timor Leste dengan Australia, yaitu daerah yang terletak diantara dua titik dasar pada pulau Timor, yaitu di sebelah timur pada titik median line antara pulau Leti (Indonesia) dan pulau Yako (Timor Leste), dan di sebelah barat pada titik mulut sungai Mota Masin di perbatasan Timor Leste dan NTT. Celah Timor (Timor Gap) merupakan wilayah perairan disebelah selatan pulau Timor yang apabila ditarik sebuah garis lurus ke selatan, wilayah ini bergaris lurus dengan wilayah Australia sebelah barat. Posisi Timor Gap sendiri secara faktual berada di 0.8.18 Lintang Selatan dan 125.34 Bujur Timor.³

Sejarah Celah Timor muncul ketika pada tahun 1972, Indonesia dan Australia menandatangani kesepakatan mengenai batas dasar laut dengan prinsip landas kontinental yang sekarang tidak diberlakukan lagi, dan membuat batas dasar laut lebih dekat dengan Indonesia dari pada Australia

karena Portugal (sebagai penguasa kolonial Timor Lorosa'e pada saat itu) menolak untuk ikut dalam perundingan tersebut maka pembuatan batas tidak selesai, dan akhirnya muncul celah yang tak berbatas yang dinamakan "Celah Timor atau Timor Gap".⁴ Dengan demikian Celah Timor ketika itu merupakan wilayah laut yang mempunyai garis batas yang tidak jelas, dengan negara-negara yang ada disekitarnya yaitu Indonesia, Australia, dan Portugal yang ketika itu masih menguasai Timor Leste. Hingga akhirnya pada tahun 1975 Indonesia melakukan invasi terhadap Timor Leste dan memaksa Timor Leste menjadi bagian dari negara Indonesia.

Celah Timor sendiri menjadi wilayah yang strategis karena wilayah ini mengandung sumber daya minyak dan gas alam. Celah Timor merupakan salah satu dari enam kawasan yang memiliki cadangan minyak tergolong besar selain Timor Leste wilayah tengah, Venezuela, Mexico, Argentina dan Madagaskar. Kemudian menurut penelitian seismik, dasar laut timor Gap atau Celah Timor diperkirakan mengandung cadangan minyak sekitar lima milliar barel atau merupakan salah satu ladang minyak terbesar dari 25 ladang minyak terbesar di dunia. Disamping itu, Celah Timor juga mengandung endapan gas alam sekitar 5.000 milliar kaki kubik.⁵

Pada tahun 1989 Indonesia dan Australia melakukan perjanjian tentang status Celah Timor, karena ketika itu Indonesia yang merupakan penguasa atas Timor Leste mempunyai hak untuk menentukan nasib dari Timor Leste

³ The Geographic of Timor Gap", <http://www.wikipedia.org>, diakses pada 12 Oktober 2012.

⁴ *Latar Belakang Sejarah Laut Timor* ", Buletin Lao Hamutuk, vol 4, no 3-4, Agustus 2003.

⁵ Tulus Warsito, "DIPLOMASI PERBATASAN", Yogyakarta, LP3M UMY, 2009, hal. 76.

termasuk nasib dari Celah Timor yang merupakan wilayah dari Timor Leste, meski banyak negara menganggap bahwa penguasaan Indonesia atas Timor Leste itu adalah tindakan yang tidak sah. Kemudian perjanjian dilakukan oleh Indonesia dengan Australia dengan kesepakatan untuk melakukan pembagian secara merata atas hasil eksplorasi yang akan dilakukan di Celah Timor oleh Indonesia dan Australia, yang kemudian wilayah yang dieksplorasi oleh Indonesia dan Australia di Celah Timor itu disebut dengan “ Daerah Kerjasama Area A “. Kesepakatan itu disebut-sebut sebagai balas budi Indonesia karena Australia menjadi negara yang mendukung langkah invasi Indonesia ke Timor Leste di tahun 1975.

Berpegangan pada hasil perundingan yang dilakukan Australia dengan Indonesia yang menghasilkan kesepakatan Celah Timor, maka Australia mendapatkan hak yang legal untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi di perairan Celah Timor. Kemudian Australia dengan menggandeng beberapa perusahaan swasta asal Australia dan beberapa dari luar Australia untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas di Celah Timor. Adapun daftar nama titik kilang minyak beserta perusahaan yang beroperasi di Celah Timor adalah:

1. **Elang-Kakatua**
Ladang ini dieksplorasi oleh perusahaan perminyakan Conoco Phillips dan telah menghasilkan pendapatan sekitar 50 juta dolar AS yang telah dibagi antara Australia dan Indonesia ketika Timor Lorosa'e diduduki oleh Indonesia.
2. **Bayu-Undan**

Ladang Gas Bayu-Undan sedang dieksplorasi oleh perusahaan minyak Conoco Phillips. Produksinya dimulai pada awal tahun 2004.

3. **Greater Sunrise**
Ladang minyak ini dieksplorasi oleh perusahaan Woodside Australian Energy yang bekerja sama dengan Royal Dutch Shell dan Osaka gas.
4. **Laminaria-Corallina**
Ladang minyak ini dieksplorasi oleh Woodside, Shell dan BHP. Ladang ini mulai memproduksi minyak pada akhir tahun 1999.

Tingkat analisis dan level analisis adalah salah satu elemen penting dalam penelitian. Tingkat analisis serta level analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah ganda. Pada tingkat analisis yakni negara bangsa (*nation state level of analysis*) dan *multinational corporation* (MNC). Fokus tingkat analisis negara bangsa adalah pada pemerintah, lembaga-lembaga pembuat keputusan, serta kelompok-kelompok yang mempengaruhi formulasi kebijakan luar negeri suatu negara.⁶ Sementara level analisisnya adalah level negara dan level intra negara. Tujuan pemilihan tingkat analisis, serta level analisis, ialah untuk membantu metodologi yang tepat sebagai pendahulunya.

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah liberalis. paradigma liberal, MNC melakukan integrasi ekonomi secara global dengan menyatukan sektor produksi, pemasaran dan investasi kedalam suatu tatanan global dari pada terpisah-pisah dalam beberapa negara. Bagi paradigma liberal, MNC akan ideal apabila

⁶ Richard W. Mansbach. *Pengantar Politik Global*, Bandung : Nusa Media. 2012

bertindak bebas dari pengaruh-pengaruh lain seperti negara bahkan dalam jangka panjang akan mampu menggantikan peran negara.⁷ Meskipun dalam paradigma liberal juga tidak memungkiri adanya peran negara yang tetap ada dalam mempengaruhi kebijakan perusahaan MNC.

Hingga memasuki abad ke-21, peran MNC yang ideal merupakan peran yang dikemukakan oleh paradigma liberal, MNC merupakan aktor yang harus merdeka dan bebas dari pengaruh-pengaruh pemerintah atau negara. Paradigma liberal atau pasar bebas berakar dari ekonomi klasik dan teori perdagangan internasional oleh Adam Smith dan David Ricardo. Argumentasi liberal adalah bahwa produksi internasional harus didistribusikan diantara negara-negara menurut Teori *Comparative Advantage*. Oleh sebab itu dalam penelitian ini lebih cenderung menggunakan paradigma liberal dan Teori *Comparative Advantage* oleh Michael E. Porter.

Berdasarkan Teori Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*) yang penulis pergunakan dalam penelitian ini, pada intinya menyatakan bahwa negara-negara harus memiliki spesialisasi produksi yang memiliki keunggulan dalam efisiensi dan dalam kerangka kerja tersebut, MNC merupakan instrumen untuk menyebarluaskan proses produksi dan jasa ke daerah-daerah yang memiliki tingkat efisiensi produksi yang tinggi.

Michael E. Porter dalam bukunya *Competitive Advantage of Nations* (1990) berasumsi bahwa MNC telah memasuki era strategi manajemen dan bisnis internasional memiliki nilai-nilai yang memberikan karakter pada

setiap aktivitas perdagangan dari pengambilan sumberdaya, produksi sampai pemasaran.⁸ Nilai-nilai dalam bisnis internasional menurut Porter menentukan strategi yang akan diambil MNC. Strategi MNC menentukan pula struktur serta lokasi aktivitas perusahaan dalam ekonomi dunia. Michael E. Porter berasumsi bahwa perusahaan multinasional (MNC) memiliki karakter pada setiap aktivitas perdagangan dari pengambilan sumber daya alam, produksi hingga pemasaran.

Hasil dan Pembahasan

Celah Timor

Celah Timor adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kawasan perairan antara Pulau Timor, Indonesia dan Australia. Wilayah perairan ini menjadi terkenal namanya karena kandungan minyak dan gas yang luar biasa didasar laut Celah Timor. Ditambah lagi konflik antara Australia dan Timor Leste tentang klaim kepemilikan atas wilayah Celah Timor, yang membuat nama Celah Timor semakin terkenal.

Wilayah perairan yang terletak pada tiga batas wilayah negara yaitu Indonesia, Australia, dan Timor Leste muncul ketika tahun 1972 dimana tidak terselesaikannya perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia, karena Portugal tidak bersedia turut serta dalam perundingan tersebut, sehingga muncul celah di Laut Timor yang kemudian disebut dengan Celah Timor. Selain itu yang menarik pada Celah Timor adalah kandungan minyak dan gas yang luar biasa didasar lautnya

⁷ Karen Mingst, "Essentials of International Relations", W.W Norton & Company Inc. New York, 1999.

⁸ Robert Gilpin, "Global Political Economy Understanding the International Economic Order", Princeton University Press, Princeton New Jersey, 2001.

yang membuat potensi konflik antar negara yang berkepentingan dengan kekayaan alam di Celah Timor. Isu tentang adanya minyak dan gas yang terkandung di Celah Timor sudah muncul ditahun 1970-an. Namun minyak yang ada di dalam wilayah Timor Lorosa'e baru ditemukan pada tahun 1994 dan pada tahun 1998 dari ladang minyak Elang Kakatua di dalam Zona Kerjasama A antara Indonesia dan Australia yang disepakati tahun 1989. Tidak ada kandungan minyak yang cukup besar yang telah ditemukan di wilayah B dan C dari zona kerjasama antara Indonesia dan Australia. Pada tahun 1994, ladang Laminaria-Corallina yang lebih besar hanya ditemukan pada bagian barat dari zona kerjasama.

Daerah yang dinamakan Timor Gap atau Celah Timor adalah daerah yang landas kontinen antara Timor Leste dengan Australia, yaitu daerah yang terletak diantara dua titik dasar pada pulau Timor, yaitu disebelah Timor pada titik *median line* antara Pulau Leti (Indonesia) dan Pulau Yako (Timor Leste) dan disebelah barat pada titik mulut sungai Mota Masin diperbatasan Timor Leste dan NTT. Celah Timor atau Timor Gap merupakan wilayah perairan disebelah selatan Pulau Timor yang apabila ditarik sebuah garis lurus ke selatan, wilayah ini bergaris lurus dengan wilayah Australia sebelah barat. Posisi Timor Gap sendiri secara faktual berada di 0.8,18 Lintang Selatan dan 125.34 Bujur Timor.⁹

Kepentingan Timor Leste untuk mendapatkan dukungan dalam kemerdekaan Timor Leste

⁹ "The Geographic of Timor Gap", <http://www.wikipedia.org> , dikutip oleh Tulus Warsito, *Diplomasi Perbatasan*, LP3 UMY, Yogyakarta, 2009.

Keterlibatan Australia dalam masalah Timor Timur sudah ada sejak wilayah ini dinyatakan jadi bagian Republik Indonesia. Perang Dingin telah membuka jalan bagi Indonesia untuk menyatukan wilayah yang rusuh dan dinyatakan Fretilin sebagai daerah yang merdeka. Saat itu kecenderungan Fretilin jelas condong ke kubu sosialis sehingga mencemaskan negara-negara Barat terutama Amerika Serikat dan Australia. Setelah B. J Habibie memegang tampuk kekuasaan, tepatnya 19 Desember 1998, John Howard, Perdana Menteri Australia mengirim surat kepada Presiden Habibie dengan mengusulkan untuk meninjau ulang pelaksanaan referendum bagi rakyat Timor Timur.

Masuknya Indonesia ke Timor Leste memang telah menimbulkan masalah sejak tahun 1975, dimana pada waktu itu terjadi perlawanan dari masyarakat Timor Leste yang menginginkan kemerdekaan, namun karena kekuatan tidak seimbang maka Timor Leste dapat dikalahkan dan dinyatakan jadi bagian dari Indonesia. Integrasi Timor Leste kedalam wilayah Republik Indonesia adalah atas dukungan Australia dimana pejabat-pejabat Australia terus memberikan saran mendukung penggabungan Timor Leste kedalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan itu diperluas dengan pengakuan *de jure* ketika Australia memulai negosiasi dengan Indonesia untuk menentukan batas wilayah laut maritim. Integrasi Timor Leste ke dalam wilayah Republik Indonesia masih tetap berjalan hingga berakhirnya Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin telah membawa perubahan bagi dinamika politik dunia dan menjadikan isu HAM sebagai isu baru dalam kanca politik Internasional.

Sejak awal Australia memahami langkah yang diambil Indonesia untuk menggabungkan kawasan berpenduduk sekitar satu juta itu kedalam negara kesatuan RI, bahkan secara eksplisit mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur. Namun demikian sikap Australia itu tidak konsisten. Sejak PM John Howard berkuasa dan terjadinya gejolak reformasi di Indonesia sehingga berada pada posisi lemah dalam tawar menawar diplomatik, Howard mendorong agar Indonesia melepaskan Timor Leste.¹⁰ Habibie pada bulan Januari 1999 menyatakan Timor Leste akan diberi dua pilihan otonomi luas atau menolaknya sehingga bisa memilih melepaskan diri dari Indonesia. Hadirnya PM John Howard sikap Australia berubah total. Australia mulai menyatakan bahwa Timor Leste untuk jangka panjang harus merdeka dan mulai mengubah kebijakan Australia atas Timor Leste dengan dasar bahwa otonomi luas harus diberikan kepada Timor Leste sebelum merdeka penuh. Australia mulai mendukung Timor Leste dalam penentuan nasib sendiri melalui Referendum.

Bentuk dukungan yang dilakukan Australia terhadap kemerdekaan Timor Leste diantaranya adalah, pertama Menteri John Howard yang terkenal rasis mengirim surat ke presiden Habibie yang mengusulkan agar Indonesia memberi otonomi ke Timor Timur. Howard bahkan memaparkan bahwa otonomi adalah pelanggaran bagi rakyat setempat yang akan merdeka beberapa tahun kemudian. Surat Howard memuat syarat yang menegaskan bahwa akhir kelaknya jajak pendapat akan terjadi, inilah bagian yang oleh pemerintah Indonesia

dianggap sebagai batang tubuh surat itu. Howard ternyata yakin bahwa kebanyakan orang Timor Timur menginginkan kemerdekaan.

Keterlibatan Australia dalam Referendum Timor Leste

Lepasnya Timor-Timur dari status provinsi ke-27 Republik Indonesia melalui referendum, bukanlah suatu hal yang terjadi secara spontan, melainkan melalui suatu proses yang cukup panjang. Indonesia sebagai pihak yang mempertahankan kedaulatan negaranya, melakukan beberapa tahap negosiasi. Tekanan lain datang dari pemerintah Australia saat itu di bawah kepemimpinan PM John Howard. Pada Desember 1998 Habibie menerima surat pribadi dari John Howard, yang berisi mengenai pandangan Howard mengenai Timor-Timur yang harus diberi kebijakan *self-determination* dan Australia secara formal siap menerima kemerdekaan Timor-Timur.

Pada tanggal 19 Desember 1998 Perdana Menteri Australia, John Howard, menulis surat kepada Presiden Habibie dalam pertemuannya dengan Habibie di Bali dan menekankan pembicaraan langsung dengan rakyat Timor-Timur secepatnya, untuk memperoleh dukungannya terhadap otonomi dalam wilayah Indonesia. Hal ini juga mencatat dukungan yang semakin bertambah, baik di Timor Timur maupun secara internasional, untuk penentuan nasib sendiri dan menyarankan pelaksanaan tindakan penentuan nasib sendiri setelah periode otonomi yang cukup lama, serupa dengan pendekatan yang disetujui di Kaledonia Baru. Tidak lama kemudian Habibie menjalankan usulan Australia mengenai penentuan nasib sendiri.

Meskipun Australia bukanlah pihak yang berkepentingan utama dalam

¹⁰www.Co./news/2008/11/16/055146219/Habibi-e-mengaku-didesak-Howard-Gelar-Referendum-Timor-Leste.html

konflik Timor Timur, namun pemerintahan Australia berturut-turut mengamati secara dekat isu ini, dan Australia terlihat sebagai pemain utama oleh Portugal dan Indonesia, serta juga oleh perlawanan Timor Timur. Kedekatan Australia dengan pulau Timor dan statusnya sebagai kekuatan menengah di wilayah ini, digabungkan dengan masyarakat sipil yang aktif, perhatian parlemen dan media atas situasi Timor Timur, membuat keterlibatan Australia tidak terelakkan, meskipun pemerintah dalam berbagai kesempatan berusaha menjauhkan diri dari isu tersebut.

Kekuatan Barat utama juga berharap Australia dapat memainkan peran penting. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Inggris menekan Australia agar meningkatkan tanggung jawabnya terhadap isu-isu regional, antara lain isu Timor Portugis, setelah isu tersebut menjadi masalah internasional pada tahun 1960. Sidang-sidang kabinet tahun 1963 tentang masa depan wilayah ini menyebutkan “usulan-usulan oleh pemerintah Amerika Serikat bahwa Australia sebaiknya harus meningkatkan inisiatif pertahanan dan diplomasi di Asia Tenggara, serta membagi tanggung jawab langsung dengan Amerika Serikat atau Inggris, daripada sekedar mendukung kepemimpinannya”.¹¹

Timor Leste melakukan pengelolaan dua ladang minyak bersama Australia

Celah Timor secara geografis berada di laut antara Indonesia – Timor

¹¹ Notulen Kabinet, Canberra, 5 Februari 1963, dalam Wendy Way (ed.), *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor 1974-1976*, Department of Foreign Affairs and Trade Documents on Australian Foreign Policy, Melbourne University Press, Victoria, 2000 DFAT.

Leste - Australia. Celah Timor merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, hal ini ditunjukkan oleh banyaknya cadangan minyak dan gas yang terkandung di dalamnya. Kekayaan sumber daya alam yang tersimpan di dasar Laut Timor dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk kepentingan kesejahteraan bangsa dan negara di masa depan.

Menurut CIA *World Factbook*, Timor Leste menunjukkan cadangan minyak sebanyak 553.800.000 barrel, hal ini belum termasuk ladang yang belum diketahui secara pasti jumlah cadangannya dikarenakan belum seluruh Celah Timor diteliti jumlah pasti cadangannya serta berlaku juga pada cadangan Gas Timor Leste yang mencapai 200.000.000.000 meter kubik yang belum termasuk ladang gas yang belum tereksplorasi. Data tersebut mengungkapkan bahwa ekonomi negara baru termuda di Asia tenggara ini memiliki harapan dalam membangun negaranya melalui sumber daya alam minyak dan gas.¹²

Australia dan Timor Leste menandatangani Kesepakatan Penyatuan Internasional (*International Unitization Agreement-IUA*) untuk Greater Sunrise

Daerah yang dinamakan *Timor Gap* atau Celah Timor adalah landas kontinen antara Timor Leste dengan Australia yang terletak diantara dua titik dasar pada Pulau Timor, yaitu daerah sebelah timur pada titik medianline antara Pulau Leti (Indonesia) dengan Pulau Yako (Timor Leste) dan sebelah barat pada titik mulut Sungai Mota Masin diperbatasan Timor Leste dan NTT. Pada November 1999 proyek-

¹² Fatma Petroleum, *Profil Celah Timor*, <http://fatmapetroleum.blogspot.co.id/2012/04/profil-celah-timor.html>.

proyek perusahaan Woodside di Laminaria Corallina mulai memproduksi minyak. Sejak itu perusahaan mengambil hampir seluruh cadangan, menghasilkan lebih dari US\$ 1,3 milyar untuk pemerintah Australia. Tanggal 20 Mei 2002, Perdana Menteri Australia dan Perdana Menteri Timor Leste menandatangani Perjanjian Laut Timor (*Timor Sea Treaty*) yang menggantikan kesepakatan tahun 2001.

Perjanjian Laut Timor membagi Laut Timor menjadi 3 bagian, yaitu :

1. Area pembangunan minyak bersama (JPDA)
2. Area milik Australia
3. Area milik Timor Leste.

Dalam area JPDA mencakup Bayu Undan, sebagian kecil Greater Sunrise (kurang lebih 20,1%), area Australia yang mencakup sebagian besar Greater Sunrise (kurang lebih 79,9%) dan Laminaria Carollina. Sebaliknya area Timor Leste mencakup area yang tidak termasuk area JPDA dan Laminaria Carrollina atau ujung terluar zona klaim Australia.

Pada tanggal 19 Juli 2002 putaran pertama perundingan Australia dan Timor Leste mengenai Kesepakatan Penyatuan Internasional (*International Unitization Agreement – IAU*). Sunrise diselesaikan dengan kedua belah pihak pada tanggal 20 September 2002 Australia memberikan satu kontrak eksplorasi pada satu wilayah yang sebagian berada pada sisi Timor Leste dari garis tengah. Kontrak-kontrak yang serupa, yang diprotes Timor Leste, diberikan pada bulan April 2003 dan Februari 2004.

Wilayah eksplorasi minyak bersama memberikan pendapatan kepada Timor Leste dan kepada Australia, ladang-ladang minyak yang berada di Celah Timor merupakan ladang-ladang migas yang paling penting bagi Timor Leste, keempat

ladang migas itu antara lain Elang Kakatua, Bayu Undan, Greater Sunrise, Laminaria Corallina.¹³

Pada tanggal 6 Maret 2003 Australia dan Timor Leste menandatangani Kesepakatan Penyatuan Internasional (IUA) untuk Greater Sunrise. Tanggal 2 April 2003 Perjanjian Laut Timor berlaku, membentuk *Timor Sea Designated Authority* (TSDA – Otorita mengenai Laut Timor) satu lembaga yang dikelola oleh dua negara yaitu Australia dan Timor Leste untuk mengelola proyek-proyek di wilayah pengembangan bersama. Ini akan berakhir dalam waktu 30 tahun, atau ketika perbatasan laut ditetapkan, tergantung mana yang lebih dulu. Pada tanggal 16 Mei 2003 Australia dan Timor Leste menyelesaikan perundingan mengenai kontrak bagi produksi dan rencana pengembangan untuk Bayu Undan.

Perjanjian *International Unitization Agreement* 2003 bertujuan untuk kilang-kilang di wilayah Greater Sunrise. Wilayah eksploitasi Greater Sunrise memiliki kandungan minyak dan gas yang lebih banyak jika dibandingkan dengan kilang-kilang lainnya. Letak kilang Greater Sunrise adalah 95 mil kearah pantai Timor Leste dan atau 250 mil arah pantai Australia tetapi Timur Leste hanya mendapatkan prosentase lebih kecil, sedangkan Australia lebih besar.

Greater Sunrise merupakan ladang minyak dan gas alam yang terbesar di kawasan Celah Timor. Teori dua landas benua Australia merupakan dasar awal dari klaim Australia terhadap ladang *Greater Sunrise* di Laut Timor yang secara geografis lebih berdekatan dengan negara Timor Leste. Australia merasa klaim atas teritorialnya yang sah

¹³ Buletin Lao Hamutuk, vol 4 Agustus 2003, www.laohamutuk.org

sesuai dengan konvensi Genewa tentang hukum laut 1958, sementara Timor Leste merasa lebih berhak dengan konvensi PBB mengenai hukum laut UNCLOS 1982.¹⁴

Secara geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi, *Greater Sunrise* merupakan salah satu ladang minyak yang dapat dijadikan sumber energi bagi Australia untuk mendukung kepentingan nasionalnya. *Greater Sunrise* memiliki kandungan gas 8,4 Tcf (*trillion cubic feet*) dan 295 juta barel kondensat, dengan estimasi pendapatan sebesar US\$ 36 miliar dari tahun 2008-2050. Perusahaan minyak Woodside (Australia) telah mengeksplorasi ladang *Greater Sunrise* sejak sebelum pendudukan Indonesia di Timor Leste pada tahun 1975. Salah satu upaya Australia untuk memperluas akses tersebut adalah dengan menanamkan pengaruh politiknya di Timor Leste secara intensif sejak pra referendum (pertengahan 1999) hingga pasca referendum. Australia merupakan negara yang membantu perjuangan rakyat Timor Leste untuk merdeka hingga menuju kemerdekaan pada tahun 2002.

Keterlibatan negara Australia terhadap kemerdekaan Timor Leste secara tidak langsung memberikan posisi politik tersendiri bagi Australia di negara tersebut. Posisi ini semakin dikukuhkan dengan bantuan ekonomi dari Australia terhadap pembangunan Timor Leste yang masih perlu melakukan penataan di berbagai bidang. Australia menggunakan kesempatan tersebut untuk mencapai tujuannya dalam memperluas akses terhadap

kandungan minyak dan gas ladang *Greater Sunrise*.

Perundingan Timor Leste dan Australia sejak tahun 2002 telah menghasilkan tiga kesepakatan pengelolaan sumber minyak dan gas di Laut Timor, yaitu Perjanjian Laut Timor (2002), Kesepakatan Penyatuan Internasional *Sunrise* (2003) dan Perjanjian CMATS (2006). Tiga kesepakatan tersebut, terutama Perjanjian CMATS, menetapkan kerjasama dalam pengelolaan sumber minyak dan gas di Laut Timor, namun tidak menyelesaikan permasalahan dasar mengenai batas-batas laut antara kedua negara. Perjanjian CMATS dihasilkan dari suatu proses diplomatis yang berlangsung lebih dari 30 tahun yang memperpanjang ketentuan bahwa penyelesaian setiap sengketa perjanjian akan dilakukan melalui perundingan bilateral dengan menunda memutuskan negara mana yang memiliki wilayah laut dan dasar laut yang mana hingga 40-50 tahun ke depan.¹⁵ Perjanjian CMATS merupakan suatu kerangka kerja yang mengatur mekanisme pelaksanaan produksi, pembagian hasil ekstraksi (50:50) hingga opsi-opsi pembangunan pipa proyek *Greater Sunrise* antara Australia dan Timor Leste.

Keinginan Australia untuk menguasai pengelolaan sumber daya minyak dan gas di Celah Timor merupakan salah satu bentuk implementasi dari prioritas kebijakan luar negeri Australia. Dalam pencapaian tujuan kebijakan luar negerinya tersebut, Australia menerapkan unsur pengaruh (*influence*) melalui penggunaan tekanan politik terhadap negara Timor Leste yang memiliki arti

¹⁴ Raimundo de FátimaAlvesCorreia. "Resume skripsi Upaya Timor Leste dalam Menyelesaikan Batas Wilayah Laut dengan Australia". 2011. < repository.upnyk.ac.id/1405/1/RESUME_SKRI PSI.pdf>. [diakses 5 Desember 2012]

¹⁵ Buletin La'o Hamutuk, "Kronologi Negosiasi laut Timor", *Perjanjian CMATS*, Vol.7, No. 1, April 2006.

strategis bagi keamanan dan kepentingan ekonominya. Hal ini berkaitan dengan tercapainya Perjanjian CMATS (*Treaty on Certain Maritime Arrangements in Timor Sea*) dalam pengelolaan proyek *Greater Sunrise* di Laut Timor antara Australia dan Timor Leste pada tahun 2006.

Perjanjian CMATS diratifikasi oleh Timor Leste bersamaan dengan Perjanjian Penyatuan Internasional *Sunrise* pada 20 Februari 2007 dengan proses yang tertutup untuk publik. Australia meratifikasi Perjanjian CMATS pada 22 Februari 2007 tanpa menunggu persetujuan parlemen mengenai periode ratifikasi dengan pengecualian kepentingan nasional agar perjanjian ini dapat diberlakukan pada hari berikutnya.¹⁶ Penjelasan kepentingan nasional Australia tersebut adalah untuk menciptakan stabilitas legal untuk eksplorasi dan eksploitasi kekayaan minyak di Laut Timor antara Timor Leste dan Australia tanpa melanggar klaim atas batas laut.

Woodside Petroleum Energy Australia

Woodside Australian Energy mengoperasikan ladang minyak Laminaria-Corallina di wilayah yang dipertentangkan sedikit di luar JPDA, dan memiliki 45% dari ladang tersebut. Pada 2000 dan 2001, penghasilan Woodside dari ladang tersebut mencapai US\$1,1 milyar, 38% dari penghasilan perusahaan tersebut. Woodside sekarang memiliki 33,4 % dari ladang *Greater Sunrise*, setelah menjual 6,5% pada tahun lalu. Woodside adalah salah satu pembeli pertama kontrak Laut Timor, pada 1991. Perusahaan ini pada awalnya

¹⁶ Buletin La'o Hamutuk, "Penjelasan Terhadap Kepentingan Nasional Australia", *Penyaringan PNTL Untuk Kembali Bertugas*, Vol.8, No.2, Juni 2007.

mendukung usulan Phillips untuk membangun pipa penyalur ke Darwin, tetapi sekarang mendukung keinginan Shell untuk membangun fasilitas terapung, dengan Jepang sebagai pelanggan utama.

Woodside adalah perusahaan Australia. Sebagian kecil dari operasinya terletak di Asia dan Afrika. Sebagian besar miliknya terletak di lepas pantai barat daya Australia, meskipun sebagian besar gasnya dijual ke Asia, dengan sebagian juga dijual ke pasar Australia. Pada 2001 Shell berusaha membeli Woodside, tetapi dicegah oleh pemerintah Australia yang merasa bahwa pemilikan asing atas sumber energi Australia yang terlalu banyak dapat membahayakan keamanan mereka. Walaupun demikian, Shell memiliki 34% dari Woodside, dan tiga orang eksekutif Shell duduk di Dewan Direktur Woodside.

Pada tanggal 11 Desember 1989 Australia dan Indonesia menandatangani perjanjian Celah Timor disebuah kapal terbang, yang terbang diatas Laut Timor. Perjanjian ini menetapkan satu Zona Kerjasama (ZOC - Zone Of Cooperation) antara Timor Leste dan Australia (kemudian disebut JPDA). Perjanjian ini menetapkan Indonesia-Australia melakukan eksplorasi bersama pada wilayah, dengan pendapatan dibagi 50-50. Perjanjian ini telah diratifikasi dan berlaku mulai tanggal 9 Februari 1991.

Greater Sunrise adalah ladang gas yang terdiri dari dua bagian yaitu *Sunrise* dan *Troubador* ini mengandung gas hampir tiga kali lipat lebih banyak dari *Bayu-Undan* yaitu sebanyak 9,17 TCF, dengan estimasi pendapatan sebesar US\$ 36 miliar dari tahun 2008-2050. Proyek *Greater Sunrise* dioperasikan oleh Woodside Australian Energy dengan memiliki saham sebesar 33% atas ladang tersebut. Selanjutnya

pada tahun 1997, perusahaan Australia Woodside dan Shell melanjutkan kegiatan pengeksplorasi dengan mengeluarkan dana sebesar AU\$ 230 juta, yang masing-masing AU\$ 30 juta untuk kegiatan studi Siemik dan AU\$ 200 juta untuk kegiatan pembangunan marketing dan *reservoir appraisal*.¹⁷

Pada November 1999 proyek-proyek perusahaan Woodside di Laminaria Corallina mulai memproduksi minyak. Sejak itu perusahaan mengambil hampir seluruh cadangan, menghasilkan lebih dari US\$ 1,3 milyar untuk pemerintah Australia. Pada tanggal 10 Februari 2000 Australia dan UNTAET menandatangani nota kesepahaman sementara, untuk melanjutkan ketentuanketentuan perjanjian Celah Timor Australia dan Indonesia tetapi menggantikan Indonesia dengan Timor Leste. Kesepakatan ini menyebutkan pembagian 50-50 antara Australia dan Timor Leste, produksi minyak dan gas dari wilayah pengembangan minyak bersama (yang dinamakan Zona Kerjasama dalam perjanjian Celah Timor).

Greater Sunrise terletak 150 kilometer (km) di tenggara Timor Leste dan sekitar 450 km di barat laut Australia. Ditemukan pada 1974, blok ini memiliki cadangan gas 5,13 Tcf (triliun kaki kubik) dan 225,9 juta barel minyak mentah. Saat ini pengelolaan Greater Sunrise dilakukan oleh konsorsium yang dipimpin perusahaan migas Australia, Woodside Energy (33,4%). Tergabung dalam konsorsium itu, ConocoPhillips (30%), Shell (26,6%) dan Osaka Gas (10%). Dari perusahaan blok migas tersebut,

¹⁷ Timor Gap/The Greater Sunrise Akhirnya kedaulatan Negara Digadai 50 Tahun, www.suaratimorlorosae.com, edisi 17 Januari 2006

Australia mendapat porsi 79,9% sementara Timor Leste hanya 20,1%. Ladang minyak dan gas Greater Sunrise adalah ladang terbesar yang ditemukan di Laut Timor setelah Bayu Undan. Para ahli memperkirakan terdapat 240 juta barel minyak dan 154 miliar meter kubik gas alam yang terkandung dalam ladang minyak Greater Sunrise.

Kesimpulan

Akses terhadap energi ini merupakan pendorong utama Australia untuk melakukan intervensi dalam menangani gejolak di Timor Timur pasca referendum. Kandungan minyak yang besar di perbatasan Timor Timur dan Australia merupakan aset penting bagi perkembangan ekonomi masa depan Australia. Ladang Bayu-Undan misalnya, ditaksir memiliki cadangan minyak 400 juta barel, 3 Tcf gas alam dan 370 juta barel cairan kondensat dan LPG.¹⁸ Keinginan Australia untuk menguasai pengelolaan sumber daya minyak dan gas di Celah Timor merupakan salah satu bentuk implementasi dari prioritas kebijakan luar negeri Australia. Terdapat kandungan gas yang sangat besar di bawah Laut Timor. Kandungan gas tersebut ditemukan pada tahun 1974 pada dua tempat yang berbeda, yaitu *Sunrise* dan *Troubador*.

Beberapa perusahaan dibawah pimpinan Woodside ingin mengembangkan proyek tersebut yang dikenal sebagai *Greater Sunrise*. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menginvestasikan uang sebanyak 200 juta dolar Australia untuk melakukan studi, pengeksplorasian serta pengeboran, dan akan dilanjutkan dengan investasi sebesar 6 miliar dolar Australia untuk memproduksi dan

¹⁸ La'o Hamutuk, "Tinjauan Ulang Mengenai Minyak dan Gas di Laut Timor", *Latar Belakang Sejarah Laut Timor, Loc.Cit.*, hal. 3.

memproses fasilitas-fasilitas pendukung.¹⁹

Posisi Australia sebagai pemimpin pasukan perdamaian tersebut secara politik dimanfaatkan oleh pemerintah Australia untuk mencapai kepentingan ekonominya sejak awal kemerdekaan Timor Leste. Pasca referendum, selama pemerintahan transisi PBB (UNTAET), Australia dan Timor Leste menyadari pentingnya minyak di dasar laut bagi masa depan Timor Leste sehingga kontrak-kontrak perusahaan minyak dipertahankan dan eksplorasi di Laut Timor dilanjutkan agar Timor Leste menerima pendapatan dari minyak dan gas tersebut.

Australia merupakan negara pengimpor minyak namun memiliki industri perminyakan yang sangat maju. Timor Leste merupakan negara baru yang masih melakukan penataan di berbagai bidang sehingga belum memiliki pengalaman maupun infrastruktur yang berkaitan dengan industri perminyakan, namun pendapatan negara Timor Leste sangat bergantung dari penghasilan proyek minyak dan gas. Kenyataan ekonomi inilah yang memaksa pemerintah Timor Leste untuk bekerjasama dengan pemerintah Australia dalam mengelola proyek *Greater Sunrise*.

Daftar Pustaka

JURNAL

Bernd Hamm, Russell Charles Smandych, *Cultural Imperialism: Essays on the Political Economy of Cultural Domination*, Broadview Press, 2005.

¹⁹ Petroleum Economist, 2011, "*Timor Leste: The Great Game of Greater Sunrise*", hal. 2, <www.petroleumeconomist.com>. [diakses 18 Januari 2013]

Mark Willacy (23 April 2001). "*Government rejects Shell bid for Woodside Petroleum*". 4 October 2013.

R. Laws and C. Kraus, "*The Regional Geology of The Bonaparte Gulf-Timor Sea Area*", APEA (*Australian Petroleum Exploration*) Journal, 1974

The Struggle of the Champions, the Economist, 8 Januari 2005.

Yessi Olivia. 2013. *Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional*. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Transnasional. Vol. 5, No. 1 Juli 2013.

Latar Belakang Sejarah Laut Timor ", Buletin Lao Hamutuk, vol 4, no 3-4, Agustus 2003.

Buletin La'o Hamutuk, "*Penjelasan Terhadap Kepentingan Nasional Australia*", *Penyaringan PNTL Untuk Kembali Bertugas*, Vol.8, No.2, Juni 2007.

BUKU

Miriam Budiardjo, *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*, Jakarta, PT. Gramedia, 1977.

Bon S. Hadiwinata (2002). *Politik Bisnis Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Dhiyaulhaq, *RPULplus sd*, Jakarta : PT. Wahyu Media. 2015

Karen Mingst, "*Essentials of International Relations*", W.W Norton & Company Inc. New York, 1999.

Marcel Hendrapati, *Majalah Ilmiah Hukum Amanna Gappa* No.13 Januari-Maret 2003.

SKRIPSI

Raimundo de Fátima Alves Correia. "Resume skripsi Upaya Timor Leste dalam Menyelesaikan Batas Wilayah Laut dengan Australia". 2011. <repository.upnyk.ac.id/1405/1/RESU ME_SKRIPSI.pdf> diakses 5 Desember 2012

INTERNET

Charles Scheiner 2003, "Tinjauan Ulang mengenai Minyak dan Gas di Laut Timor", Dili, La'o Hamutuk, dalam http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hi/207613041/bab_2.pdf diakses 13 Oktober 2012.

Fatma Petroleum, "Profil Celah Timor", dalam <http://fatmapetroleum.blogspot.com/2012/04/profil-celah-timor.html>, diakses 28 Oktober 2012.

Evren Koksall, "the Impact of Multinational Corporations on Internastional Relations : A Study of American Multinationals", 2006, Middle East, diakses dari: (<http://www.etd.lib.metu.edu.tr/upload/12608016/index.pdf>), pada 04 April 2014.

Petroleum Economist, 2011, "Timor Leste: The Great Game of Greater Sunrise", www.petroleumeconomist.com diakses 18 Januari 2013

Soedjati Djiwandono, "Konsep-konsep Keamanan : Pengalaman Indonesia", dalam http://www.unisosdem.org/kumtul_detail.php diakses 13 Oktober 2012

Garry Woodard, "Whitlam Turned Focus on to Asia", 2005 dalam <http://www.theage.com.au/news/opinio>

[n/whitlam-turned-focus-on-to-asia](http://www.whitlam-turned-focus-on-to-asia) diakses 11 Oktober 2012

JUSTICE, "Why Aussy Invaded East Timor? Oil in Timor Gap", dalam <http://www.asiafunclub.com/indonesia/forum/messages/8827.html> diakses 19 Oktober 2012

La'o Hamutuk berdasarkan informasi penjualan dan pajak dalam laporan Woodside pada bursa saham Australia (*Australian Stock Exchange*). http://www.laohamutuk.org/Oil/Boundari/laminaria_revenues.html